



LAPORAN KINERJA

KPKNL TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2022
(1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2022)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA BARAT
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TASIKMALAYA

20 JANUARI 2023

KPKNL TASIKMALAYA



DAFTAR ISI

COVER	1
DAFTAR ISI	2
SURAT PENGANTAR	3
BAB I	PENDAHULUAN	4
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	11
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	13
	A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	13
	A.1 Membandingkan antara target dan realisasi tahun 2022	13
	A.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2022 dan tahun sebelumnya	16
	A.3 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	20
	A.4 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	23
	A.5 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja	23
	A.6 Analisis atas pelaksanaan rencana aksi (mitigasi risiko) yang telah disusun dalam pencapaian target	24
	A.7 Rencana Aksi	24
	B. REALISASI ANGGARAN DAN DAFTAR PENGHARGAAN TAHUN 2022	25
BAB IV	PENUTUP	26
	LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 (LAKIN) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tasikmalaya ini disusun sebagai pertanggungjawaban dalam pencapaian visi dan misi DJKN selama tahun anggaran 2022. Dalam pelaksanaan tugas untuk pencapaian kinerja KPKNL Tasikmalaya selalu mengacu pada visi DJKN yaitu : "Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

LAKIN mempunyai beberapa fungsi antara lain merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Tasikmalaya menuju *good governance* dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Di sisi lain, LAKIN merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan DJKN.

Selanjutnya seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, KPKNL Tasikmalaya telah menerapkan sistem *Balance Scorecard* (BSC) sebagai alat manajemen kinerja. Performa KPKNL Tasikmalaya dinilai berdasarkan pengukuran indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan kontrak kinerja Kepala KPKNL Tasikmalaya dengan Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat tahun 2022. Oleh karena itu, pengukuran kinerja dalam LAKIN Tahun 2022 ini adalah berdasarkan hasil capaian kinerja IKU berbasis BSC.

Dapat kami sampaikan bahwa LAKIN 2022 KPKNL Tasikmalaya ini dibuat dengan mengacu pada Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2022 dan juga berdasarkan Sasaran Strategis (SS) serta Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2022. Sesuai Kontrak Kinerja tahun 2022 KPKNL Tasikmalaya memiliki sebanyak 21 IKU yang seluruhnya memenuhi target. Masih adanya pandemi *Covid-19* dan pembatasan social yang masih berlangsung di sepanjang tahun 2022 menjadi salah satu tantangan yang tidak hanya dihadapi oleh KPKNL Tasikmalaya namun dialami oleh semua pihak. Dalam hal ini KPKNL Tasikmalaya berusaha memberikan pelayanan yang optimal, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penularan *Covid-19* dengan berbagai inovasi layanan, seperti mengoptimalkan pelayanan secara *online* serta penerapan WFO dan WFH bagi para pegawai.

Tersusunnya LAKIN 2022 ini merupakan hasil kerjasama dan dukungan dari seluruh jajaran KPKNL Tasikmalaya. Apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran KPKNL Tasikmalaya yang juga telah bersinergi mendukung pencapaian visi dan misi DJKN. Kami berharap LAKIN Tahun 2022 ini dapat menjadi salah satu acuan dalam meningkatkan kinerja KPKNL Tasikmalaya di masa yang akan datang.

Tasikmalaya, Januari 2023
Kepala Kantor



Thamrin

BAB I PENDAHULUAN

Seiring dengan adanya Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai salah satu bagian Kementerian Keuangan memiliki peran strategis dalam pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tasikmalaya sebagai instansi vertikal DJKN merupakan ujung tombak yang langsung berhubungan dengan masyarakat pengguna jasa. Mengingat sangat pentingnya peran tersebut, KPKNL Tasikmalaya melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan kinerja secara sistematis dan berkesinambungan dengan memaksimalkan segenap keterbatasan sumber daya yang ada secara sinergis dan komprehensif sehingga tercipta sikap kerja yang profesional, akuntabel, transparan sesuai dengan tuntutan masyarakat sehingga dapat menjadi kantor pelayanan yang dibanggakan oleh masyarakat.

Salah satu langkah kongkrit yang dilakukan oleh KPKNL Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas tersebut adalah dengan melaksanakan secara konsisten berbagai kebijakan di bidang pelayanan kepada masyarakat, dengan berpedoman pada:

- 1) Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- 2) Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
- 3) Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- 4) Keputusan Menteri keuangan Nomor : 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi Departemen keuangan

Selain hal tersebut di atas, sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, KPKNL Tasikmalaya menjadi salah satu pilar dalam Reformasi Keuangan Negara yang dicanangkan oleh Menteri Keuangan. Dengan dilandasi oleh tiga regulasi utama di bidang keuangan negara, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Sebagai Kantor yang telah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di tahun 2019 dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di tahun 2022, KPKNL Tasikmalaya selalu berusaha menjaga integritasnya dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat dengan menghindari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta praktik penerimaan gratifikasi di semua jenis pelayanannya, baik di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan lelang, dalam rangka meningkatkan penerimaan negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara dan bea lelang serta melakukan pengamanan kekayaan negara dengan melakukan pengadministrasian dan penilaian aset negara. Dengan selalu menjunjung tinggi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dalam memberikan pelayanan maksimal, KPKNL Tasikmalaya terus berupaya untuk menjadi Kantor Pelayanan terbaik dalam melaksanakan pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan lelang.

Untuk memberikan arah, inspirasi serta menjaga semangat kerja seluruh jajarannya, KPKNL Tasikmalaya memiliki visi dan misi sebagai berikut :

VISI :

“Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

MISI :

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektifitas Pengelolaan Kekayaan Negara;
2. Mengamankan Kekayaan Negara secara fisik, administrasi dan hukum;
3. Mewujudkan Nilai Kekayaan Negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
4. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
5. Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.135/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah DJKN dan KPKNL, mempunyai Tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan Negara, penilaian, piutang negara, dan lelang.

Dalam melaksanakan tugas tersebut KPKNL Tasikmalaya menyelenggarakan fungsi:

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
4. Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/ penjamin hutang;

5. Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/ atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan atau penjamin hutang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;
6. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;
7. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain;
8. Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
9. Pelaksanaan pelayanan lelang;
10. Pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;
11. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
12. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;
13. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
14. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

Salah satu cara untuk menjaga agar dalam melaksanakan proses bisnisnya bisa berjalan sesuai dengan peraturan dan SOP yang ada, KPKNL Tasikmalaya mengambil langkah dengan mengoptimalkan tugas dan fungsi seksi Kepatuhan Internal.

Ada 11 (sebelas) Kegiatan yang dipantau dalam Pemantauan Pengendalian Utama yang seluruhnya merupakan layanan unggulan, yaitu :

1. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan;
2. Persetujuan/Penolakan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan;
3. Verifikasi dan Analisis Permohonan Penilaian;
4. Penyusunan Laporan Penilaian;
5. Penetapan Jadwal Lelang;
6. Pelaksanaan Lelang;
7. Pelayanan Pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang;
8. Pelayanan Pemberian Kuitansi Pembayaran Harga Lelang;
9. Pelayanan Pemberian Kutipan Risalah Lelang dan Dokumen Kepemilikan Barang;
10. Penyetoran Hasil Bersih Kepada Penjual Melalui Bendahara Penerimaan;
11. Penyusunan Minuta Risalah Lelang.

Selama ini seksi Kepatuhan Internal melakukan fungsi Pemantauan Pengendalian Utama dengan cara :

1. PPU berupa reviu dokumen dituangkan dalam DUPU (Daftar Uji Pengendalian Utama) dan terangkum dalam LHPPU (Laporan Hasil Pemantauan Pengendalian Utama) dwimingguan, bulanan, triwulanan dan semesteran.
2. Pelaksanaan Observasi yang dilaksanakan minimal 1 (satu) Bulan sekali per kegiatan yang dipantau. Dituangkan dalam TOPU (Tabel Observasi Pengendalian Utama).

Feedback Utama dari Pemilik dan Pelaksana Pengendalian

1. Pelaksanaan PPU dapat membantu mengidentifikasi adanya pengendalian utama yang tidak dilaksanakan;
2. Pelaksanaan PPU dapat membantu mengidentifikasi adanya indikasi kesalahan maupun kecurangan (fraud);
3. Dengan adanya pelaksanaan PPU, pegawai semakin berhati-hati dalam mengerjakan tugas-tugasnya dan pejabat lebih teliti dalam mengawasi pekerjaan;
4. Rekomendasi yang diberikan oleh Pelaksana Pemantauan dapat membantu mengatasi permasalahan karena lebih objektif;
5. Manfaat yang dirasakan dengan adanya pelaksanaan PPU antara lain: kinerja lebih terkendali, pelaksanaan pekerjaan lebih tertib, dan pejabat/pegawai bekerja lebih teliti dan cermat sesuai ketentuan;
6. Pelaksanaan PPU tidak menghambat pekerjaan sehari-hari selama permintaan berkas sesuai dengan keperluan dan adanya koordinasi yang baik;
7. Pemilik pengendalian menyarankan agar hasil pemantauan dapat direkapitulasi secara tertulis dan disampaikan kepada Pemilik Pengendalian sehingga bisa menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kinerja

Sudah barang tentu dalam menjalankan tugas dan fungsinya (proses bisnis) dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi, KPKNL Tasikmalaya mengalami beberapa hambatan/permasalahan, antara lain :

1. Permasalahan di Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara :

Meskipun selama ini KPKNL Tasikmalaya selalu berhasil mencapai target di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, namun demikian kenyataan di lapangan ada beberapa kendala/permasalahan yang timbul, yaitu :

1. Pengawasan dan Pengendalian BMN (Wasdal)

Permasalahan :

- Masih kurangnya kesadaran satker-satker dalam menyampaikan laporan wasdal kepada KPKNL.
- Tidak terdapat sanksi yang bagi satker-satker yang tidak menyampaikan laporan wasdal.

2. Pengelolaan BMN.

a. Permasalahan :

- Satuan kerja tidak menindaklanjuti persetujuan pengelolaan BMN telah ditangani secara parsial sebab risiko ini hanya ditindaklanjuti dengan hanya memberikan surat himbauan;
- Masih terdapat syarat permohonan yang diajukan kurang lengkap, sehingga perlu dilakukan permintaan kelengkapan berkas yang membutuhkan waktu lama.
- Masih Kurangnya kesadaran sebagian satker di K/L dalam pengajuan permohonan pengelolaan BMN, sehingga untuk pengguna barang tertentu masih sangat sedikit pengajuannya.
- Khusus satker TNI, masih banyak BMN yang telah dilakukan pemanfaatan namun belum diajukan permohonannya kepada pengelola barang. Hal ini disebabkan karena panjangnya birokrasi serta adanya sistem komando di lingkungan TNI .
- Untuk Pemanfaatan Sewa Bahwa Target Tidak Sebanding Dengan Potensi Yang ada di KPKNL Tasikmalaya,
- Penerimaan yang berasal dari Hibah tidak termasuk ke dalam capaian PNBPKN;

3. Aplikasi.

Permasalahan Aplikasi pada PKN lebih banyak terjadi pada penerapan aplikasi SIMAN di antara permasalahan tersebut adalah :

- Masih banyak menu dalam aplikasi SIMAN yang belum sempurna, sehingga sampai saat ini belum dapat diterapkan dengan baik.
- Aplikasi SIMAN memerlukan koneksi internet yang cepat, dan di saat bersamaan koneksi internet pada satuan kerja maupun KPKNL masih cukup lambat, sehingga menyebabkan uploading data sering kali tidak berhasil serta harus dilakukan beberapa kali, namun hal ini telah di atasi oleh KPKNL Tasikmalaya dengan pemasangan jaringan internet tambahan.
- Aplikasi SIMAN memerlukan spesifikasi Komputer/Laptop yang tinggi, sehingga tidak semua satker mempunyai fasilitas yang sesuai dipersyaratkan.

2. Permasalahan di Bidang Pengurusan Piutang Negara :

Permasalahan di bidang pengurusan piutang negara ini sangat erat hubungannya dengan pencapaian target baik target PNDS maupun target BIAD PPN dan BKPN yang sekarang ada dalam pengurusan KPKNL Tasikmalaya sebagian besar merupakan BKPN yang tidak lengkap, yaitu BKPN yang tanpa dilengkapi dengan Barang Jaminan dan jikapun ada, barang jaminan tersebut tidak didukung dengan bukti kepemilikan yang kuat ditambah dengan kondisi debitur yang rata-rata pailit dan tidak mampu serta sebagian besar piutang yang merupakan piutang kredit pemerintah.

Sulitnya Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara yang penyerahan s.d. tanggal 31 Desember tahun 2010. Hingga akhir tahun 2022 penyelesaian BKPN kategori I perolehan s.d 31 Desember 2010 adalah 0 berkas. Berbeda dengan penyelesaian BKPN perolehan diatas tahun 2010 yang memungkinkan dapat didominasi oleh BKPN serahan baru. Meski demikian, penyelesaian berkas pada rentang waktu tersebut masuk ke dalam normal perhitungan 1 kali atau setengah kali lebih rendah dari fisik berkas yang diselesaikan. Atas BKPN yang masuk ke dalam kategori I telah dilakukan kegiatan konfirmasi atas jumlah jaminan harta bergerak, hal ini perlu dilakukan mengingat hampir seluruh barang jaminan tersebut telah berpindahtangan. Melaksanakan koordinasi dengan baik dengan pihak samsat maupun kepolisian guna mengidentifikasi kemungkinan adanya cacat hukum.

Atas BKPN yang tidak didukung oleh barang jaminan yang masuk ke dalam penyelesaian kategori II yakni atas seluruh BKPN perolehan 1 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2022, dan atau ada jaminan namun hanya berupa letter C, Seksi PN telah melaksanakan koordinasi dengan penyerah piutang. Hal ini guna meminta pertanggung jawaban Penyerah Piutang atas upaya mereka dalam melaksanakan penyelesaian BKPN yang diserahkan kepada PUPN. Hal ini perlu dilakukan agar terjadi kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak penyerah piutang dengan KPKNL Tasikmalaya karena masing-masing pihak memiliki target terkait penyelesaian piutang.

3. Permasalahan di Bidang Pelayanan Penilaian :

Pada bidang penilaian sebetulnya tidak ditemukan masalah atau kendala yang berarti, dan selama ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya. Namun ada sedikit kesulitan dalam pencapaian target laporan dikarenakan jumlah laporan sangat tergantung dari jumlah permohonan dari satker. Permohonan dari satker tidak dapat diprediksikan. Upaya yang selama ini sudah diambil oleh KPKNL Tasikmalaya adalah dengan melakukan penggalan potensi ke Pemerintah Daerah di wilayah kerja KPKNL Tasikmalaya untuk memanfaatkan jasa penilaian melalui KPKNL, dan hal ini sudah mendapatkan hasil tanggapan yang baik dari Pemerintah Daerah tersebut. Adapun untuk IKU deviasi ketergunaan hasil penilaian terdapat nilai pengajuan dari satker lebih besar daripada nilai yang ditetapkan oleh Penilai sehingga deviasi nilai terjadi namun masih dalam batas yang ditentukan dalam IKU tersebut.

4. Permasalahan di Bidang Pelayanan Lelang

Permasalahan yang sering dihadapi di bidang pelayanan lelang antara lain :

a. Banyaknya frekuensi lelang Tidak Ada Peminat

Sebagai Risiko paling tinggi apabila dikaitkan dengan capaian target hasil lelang. Hal ini terutama terjadi pada lelang eksekusi hak tanggungan yang nilainya cukup besar, walaupun demikian target pokok lelang dan produktifitas

lelang untuk tahun 2022 tetap tercapai. Selanjutnya Nilai Manfaat Ekonomi terkait penerimaan Bea Lelang walaupun juga tercapai.

b. Dalam hal lelang via internet (*open dan closed bidding*)

Kendala muncul dari masyarakat pengguna jasa lelang yang mengalami kesulitan dalam registrasi dan tata cara mengikutinya. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pengetahuan terhadap teknologi informasi/ internet. Untuk lelang eksekusi yang berpotensi timbul gugatan lebih aman menggunakan lelang konvensional, karena penyampaian informasi kepada peserta lelang secara langsung dan menyeluruh.

5. Permasalahan di Bidang Hukum dan Informasi :

a. Pada aplikasi Aplikasi Focus PN

Terkendala masalah input data pada aplikasi dimana Seksi Hukum & Informasi harus menunggu Seksi Piutang Negara melakukan input data terlebih dahulu.

b. Pada Aplikasi Sibankum

Terkendala dalam hal form Laporan yang tidak menyediakan kolom Pengadilan Agama.

c. Belum optimalnya peran seluruh pegawai dalam mendukung kegiatan publikasi dan kehumasan.

Hal ini terlihat dari kurangnya antusiasme pegawai dalam Gerakan Employee Advocacy, merespon setiap publikasi berita kegiatan maupun kontribusi atas isi konten berita/artikel di portal maupun sosial media milik kantor terkait tugas dan fungsi masing-masing.

d. Dalam penanganan perkara lelang

Sering ditemui gugatan lelang yang terjadi sebelum KPKNL Tasikmalaya berdiri sehingga dokumen risalah lelang dsb sulit ditemukan yang membuat penanganan perkara gugatan lelang mengalami kendala.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada akhir Tahun Anggaran 2022 KPKNL Tasikmalaya telah menyusun rencana kinerja untuk Tahun Anggaran 2023, dan mengusulkan rencana target untuk Tahun 2023 kepada Kantor Pusat DJKN. Target rencana tersebut dituangkan dalam Kontrak Kinerja dan dijabarkan dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU).

Adapun ringkasan/ikhtisar perjanjian rencana kinerja Tahun Anggaran 2023 KPKNL Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							
1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	20%	25%	25%	30%	30%	36%	36%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi							
3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	-	-	-	-	-	4,63	4,63
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	50%	50%	55%	55%	65%	65%
4b-CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	20%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4d-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
6a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E- Auction dan E-Conventional Auction	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
6b-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
7	Edukasi yang Efektif							
7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	-	94,76	94,76	-	94,76	94,76	94,76
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							
8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	-	40%	40%	-	40%	85%	85%
9	SDM yang Kompeten							
9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
10	Organisasi yang Fit For Purpose							
10a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM	-	-	-	-	-	85	85
10b-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	-	-	-	-	-	80	80
10c-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90	90	90	90	90	90	90
11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal							
11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%
11b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	10%	50%	50%	85%	85%	100%	100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

A.1 Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pada Tahun Anggaran 2022 ini KPKNL Tasikmalaya bisa mencapai hampir seluruh target yang telah ditetapkan, kecuali untuk target Hasil Lelang dan Produktifitas Lelang, dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 111,77%. Lebih jelasnya di bawah ini adalah gambaran tentang perbandingan antara target dan realisasi di Tahun Anggaran 2022 :

Kode	IKU	V/C	Target s.d. Q4	Realisasi s.d. Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Ket.
	Stakeholder Perspective(30%)							34,08%	
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan negara dan lelang Terhadap Perekonomian							113,60%	
1a-CP	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100%	107,20%	14%	50%	107,199%	107,20%	hijau
1b-CP	Persentase Produktifitas lelang	P/M	36%	43,44%	14%	50%	120,66%	120,00%	hijau
	Customer Perspective(20%)							22,73%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							120,00%	
2a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/M	100%	137,73%	14%	50%	137,73%	120,00%	hijau
2b-CP	Persentase Penurunan outstanding piutang negara	P/M	100%	228,16%	14%	50%	228,16%	120,00%	hijau
3	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi							107,28%	

Kode	IKU	V/C	Target s.d. Q4	Realisasi s.d. Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Ket.
3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	E/M	4,63	4,97	21%	100%	107,28%	107,28%	hijau
	Internal Process Perspective (25%)							31,94%	
4	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							116,01%	
4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/L	65%	78,35%	19%	30%	120,54%	120%	hijau
4b-CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	P/H	100%	1168,66%	19%	30%	1168,66%	120,00%	hijau
4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	P/M	100%	126,36%	11%	22%	102,04%	102,04%	hijau
4d-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	P/H	100%	126,36%	11%	17%	126,36%	120%	hijau
5	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							120,00%	
5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	P/M	19%	0,09%	14%	100%	199,53%	120,00%	hijau
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							114,35%	
6a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E- Auction dan E-Conventional Auction	P/M	92%	100%	14%	50%	108,70%	108,70%	hijau
6b-CP	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	P/M	10%	0,00	14%	50%	200,00%	120%	Hijau

Kode	IKU	V/C	Target s.d. Q4	Realisasi s.d. Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Ket.
7	Edukasi yang Efektif							160,74%	
7a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	94,76%	96,53%	14%	50%	101,87%	101,87%	hijau
8	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							109,80%	
8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	P/M	85%	93,33%	14%	100%	109,80%	109,80%	hijau
	Learning & Growth Perspektive							28,53%	
9	SDM yang Kompeten							120,00%	
9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120%	14%	100%	120,00%	120,00%	hijau
10	Organisasi yang fit for purpose							112,16%	
10a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM	P/M	85	91,34	14%	33%	1007,46%	100,12%	hijau
10b-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	P/M	80	96,93	14%	33%	121,16%	120,00%	hijau
10c-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	P/M	90	98,11	14%	33%	109,01%	109,01%	hijau

Kode	IKU	V/C	Target s.d. Q4	Realisasi s.d. Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Ket.
11	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal								
11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	95%	95,78%	14%	50%	100,29%	100,29%	hijau
11b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	P/M	100%	167,86%	14%	50%	167,86%	120,00%	hijau
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								111,77%	hijau

A.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2022 dengan beberapa tahun sebelumnya

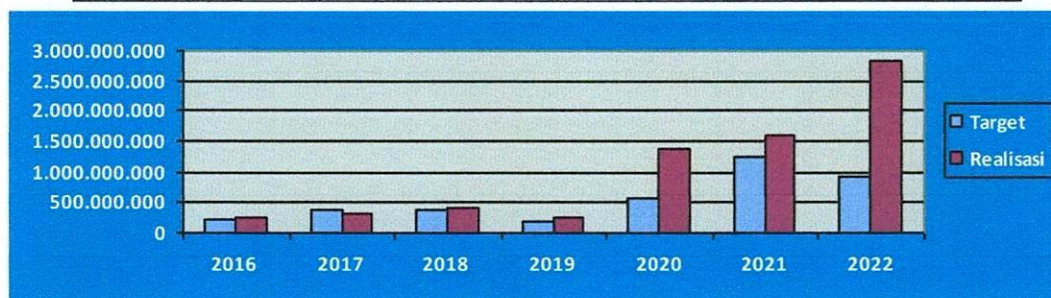
Berikut adalah perbandingan capaian kinerja KPKNL Tasikmalaya Tahun 2022 dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya :

UTILISASI

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	2016	28.800.000.000	38.093.831.078	132,27%
2	2017	90.000.000.000	111.527.008.427	123,92%
3	2018	125.000.000.000	143.993.547.680	114,72%
4	2019	558.971.649.581	574.887.434.232	101,64%
5	2020	506.881.850.717	618.317.892.980	121,98%
6	2021	2.854.000.000	2.705.822.945	94,8%
7	2022	2.500.000.000	2.764.984.547	110,6%

PNDS

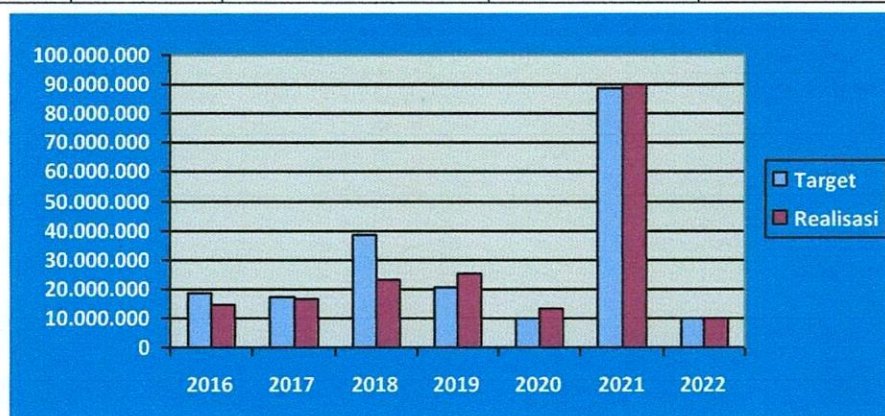
NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	2016	231.173.069	270.564.156	117,04%
2	2017	387.695.458	325.291.893	83,90%
3	2018	382.354.432	401.756.436	105,07%
4	2019	203.050.543	255.935.363	126,05%
5	2020	566.764.696	1.358.389.682	239,67%
6	2021	1.238.777.221	1.584.959.935	127,95%
7	2022	929.082.916	2.825.823.476	304,15%



Grafik Perbandingan Target dan Realisasi PNDS Tahun 2016-2022

BIAYA ADMINISTRASI PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

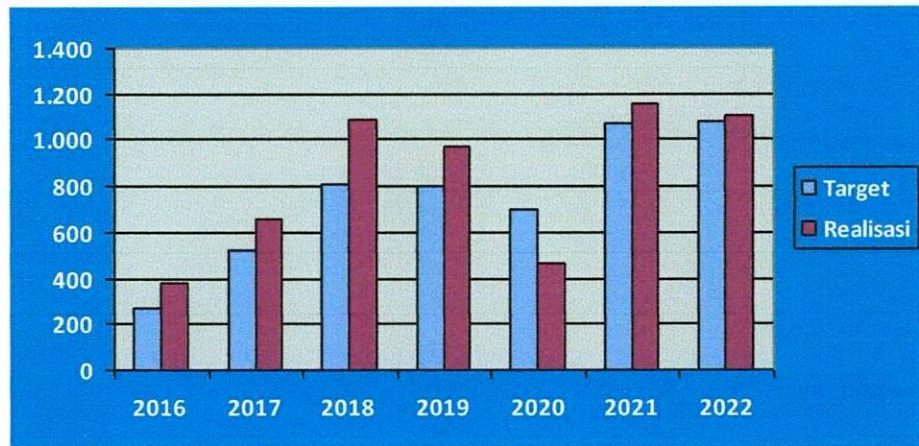
NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	2016	18.493.846	14.640.801	79,16%
2	2017	17.027.806	16.756.634	98,41%
3	2018	38.352.821,1	23.066.536	60,14%
4	2019	20.394.073	25.002.686	122,60%
5	2020	10.000.000	13.402.508	134,03%
6	2021	89.000.000	90.367.154	101,54%
7	2022	10.025.000	10.179.455,80	101,95%



Grafik Perbandingan Target dan Realisasi PNDS Tahun 2016-2022

BKPN YANG DAPAT DISELESAIKAN

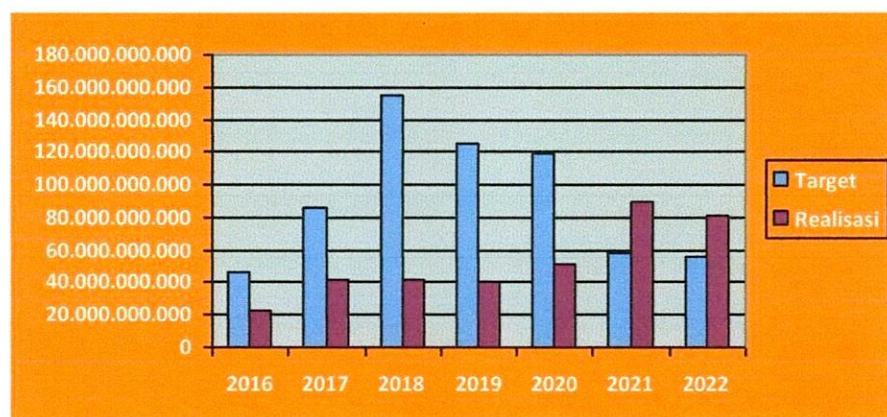
NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	2016	271	376	138,74%
2	2017	522	655	125,48%
3	2018	810	1.086	134,07%
4	2019	800	966	120,75%
5	2020	700	460	42,64%
6	2021	1.075	1.155	107,44%
7	2022	1.080	1.102	102,04%



Grafik Perbandingan Target dan Realisasi BKPN Tahun 2016-2022

POKOK LELANG

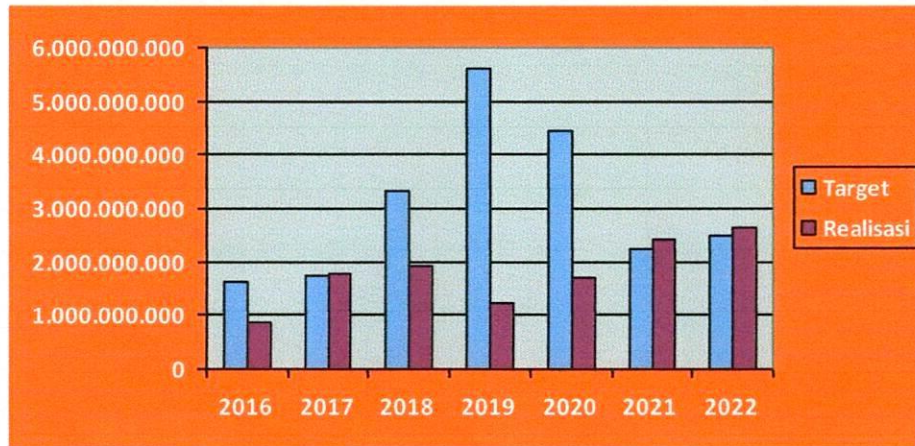
NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	2016	46.901.000.000	23.112.503.838	49,28%
2	2017	86.095.000.000	41.816.619.150	48,57%
3	2018	155.044.000.000	42.251.950.439	27,25%
4	2019	124.607.000.000	40.295.273.819	32,34%
5	2020	119.612.000.000	51.324.847.247	42,91%
6	2021	58.000.000.000	88.851.241.809	153,19%
7	2022	56.100.000.000	80.723.133.330	143,89%



Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Pokok Lelang Tahun 2016-2022

BEA LELANG

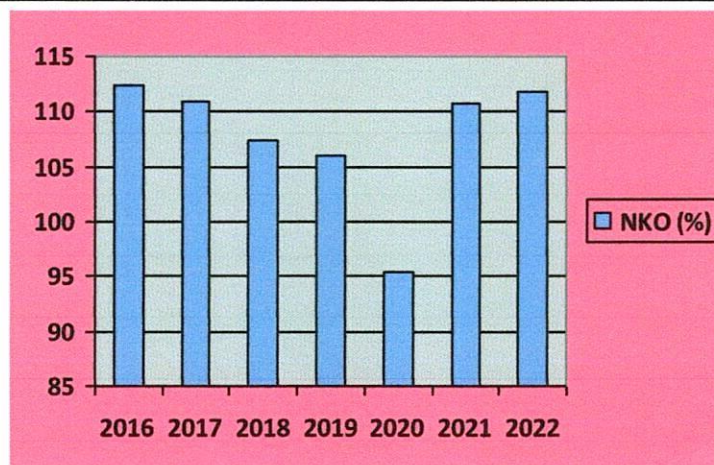
NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	2016	1.620.761.000	868.950.470	53,61%
2	2017	1.732.000.000	1.773.280.980	102,38%
3	2018	3.328.467.000	1.917.388.096	57,61%
4	2019	5.588.953.888	1.237.378.375	22,14%
5	2020	4.445.000.000	1.703.678.398	38,33%
6	2021	2.239.000.000	2.427.123.439	108,40%
7	2022	2.500.000.000	2.646.298.671	105,85%



Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Bea Lelang Tahun 2016-2022

NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)

NO	TAHUN	NKO
1	2016	112,38%
2	2017	110,97%
3	2018	107,44%
4	2019	106,02%
5	2020	95,37%
6	2021	110,76%
7	2022	111,77%



Grafik Capaian NKO Tahun 2016-2022

A.3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan :

1. Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara:

Selama ini kinerja KPKNL Tasikmalaya dalam hal pengelolaan kekayaan negara cukup berhasil, baik dalam mencapai target maupun dalam memberikan pelayanan kepada para pengguna jasa layanan. Penyebab keberhasilan dalam bidang pengelolaan kekayaan negara ini ditentukan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal.

a. Faktor internal yaitu :

- Dukungan sarana dan prasarana yang cukup memadai
- Sumber daya manusia yang semakin lama semakin menguasai dalam segala hal tentang pengelolaan kekayaan negara
- Peraturan yang sederhana, mudah dan tidak menyulitkan dalam hal pengelolaan kekayaan negara
- Adanya kegiatan diklat dan sosialisasi untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM dalam hal pengelolaan kekayaan negara
- Adanya penghargaan dan dukungan yang baik dan penuh dari pimpinan organisasi, sehingga bisa memunculkan spirit dan motivasi yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan.
- SDM yang selalu menerapkan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dalam memberikan pelayanan kepada para satker/pengguna jasa sehingga akan mewujudkan pelayanan prima.
- Terakhir dari dalam diri SDM itu sendiri, yaitu adanya niat baik dan rasa ikhlas serta kepatuhan terhadap SOP yang ada untuk memberikan pelayanan kepada para pengguna jasa.

b. Faktor Eksternal yaitu :

- Semakin timbulnya kesadaran yang baik dari para satker/pengguna jasa tentang pentingnya pengelolaan kekayaan negara yang tertib.
- Terciptanya hubungan dan kerja sama serta komunikasi yang harmonis dengan para satker/pengguna jasa.
- Sedangkan apabila terjadi kegagalan atau penurunan kinerja penyebabnya tidak lain adalah kebalikan dari penyebab keberhasilan tersebut, ditambah dengan adanya peraturan-peraturan yang sangat menyulitkan satker/pengguna jasa atau peraturan-peraturan yang kurang mengakomodir dalam hal pengelolaan kekayaan negara.
- Untuk menghindari terjadinya kegagalan atau penurunan kinerja di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, KPKNL Tasikmalaya telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya, yaitu :
- Penyampaian Apresiasi kepada Satker yang menghasilkan PNB dan Penggalan Potensi PNB kepada Satker belum berkontribusi
- Sukses Sertifikasi kepada Satker Penghasil Capaian Sertifikasi 2022 dan Koordinasi Intimasi Olahan Sertifikasi 2023



- Monitoring dan Koordinasi tindak lanjut hasil pemanfaatan PNB
- Selalu berusaha menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan
- Selalu memberikan dukungan penuh dan penghargaan yang baik kepada para pegawai
- Selalu memberikan pembinaan dan pengarahan kepada pegawai agar pegawai senantiasa memberikan pelayanan prima kepada para pengguna jasa.
- Melakukan sosialisasi tentang pentingnya pengelolaan kekayaan negara yang tertib secara terjadwal dan berkesinambungan kepada para satker/pengguna jasa.
- Senantiasa menekankan pentingnya Nilai-Nilai Kementerian Keuangan kepada para pegawainya dalam segala bidang pelayanan.
- Senantiasa membangun sinergi antara KPKNL, Kantor Pertanahan dan Satker yang mempunyai BMN berupa tanah yang belum di sertifikatkan agar saling bekerjasama untuk mensukseskan target program sertifikasi BMN.

2. Bidang Pengurusan Piutang Negara.

Pada Tahun Anggaran 2022 ini kinerja KPKNL Tasikmalaya di bidang pengurusan piutang negara belum optimal, terutama dalam hal Persentase Efektivitas Penyelesaian Crash Program Keringanan Utang dan efektivitas penyelesaian BKPN.

Kurang Optimalnya IKU ini disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu :

- Rendahnya minat para debitur untuk menggunakan fasilitas crash program keringanan utang dalam menyelesaikan hutangnya, KPKNL Tasikmalaya telah berupaya dengan optimal dengan mengelompokkan BKPN yang berpotensi untuk ikut crash program tersebut dan juga sosialisasi kepada Debitur.
- Kondisi BKPN yang bermasalah dan tidak lengkap serta tidak didukung dengan jaminan, sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja, semangat dan motivasi petugas/pegawai/pemegang berkas
- Sebagian besar penanggung hutang/debitur tidak mempunyai kemampuan usaha dan finansial untuk menyelesaikan hutangnya
- Kurangnya penyerahan BKPN Baru
- Untuk mengatasinya KPKNL Tasikmalaya telah melakukan beberapa langkah yaitu :
- Optimalisasi penyelesaian BKPN dengan fokus pada Penurunan Outstanding BKPN
- Peningkatan intensitas surat paksa dan penagihan langsung debitur
- Optimalisasi Crash Program atas perencanaan Crash Program pada pemda wilayah kerja KPKNL Tasikmalaya

- Selalu berusaha memberikan dukungan sarana dan prasarana yang diperlukan.
- Selalu memberikan pembinaan dan pengarahan serta dukungan dan penghargaan kepada para pegawai sehingga semangat dan motivasi untuk berkinerja baik selalu terjaga.
- Selalu mengikutkan pegawai apabila ada kegiatan diklat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM.
- Penggalan potensi piutang Pemerintah Daerah, dengan cara melakukan sosialisasi ke Pemda di wilayah kerja KPKNL Tasikmalaya.
- Penggalan potensi piutang Pemerintah Daerah ini sudah menunjukkan hasil yang baik yaitu beberapa Pemerintah Daerah sudah mulai menyerahkan piutangnya kepada KPKNL Tasikmalaya, Pemerintah Daerah Kab. Ciamis termasuk RSUD Ciamis, RSUD Kab. Tasikmalaya dan ke depannya akan diikuti oleh RSUD lainnya.

3. Bidang Pelayanan Lelang

Di bidang pelayanan lelang kinerja KPKNL Tasikmalaya sudah cukup optimal. Terlihat dari capaian IKU dari Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang dimana penerimaan PNPB dari Bea Lelang mencapai target yang diharapkan, selanjutnya IKU Persentase hasil lelang (Pokok Lelang) dan IKU Persentase produktivitas lelang. Namun dari jumlah pelaksanaan dan laku lelang masih terlampau jauh perbedaannya. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal :

Faktor Eksternal yaitu :

• Calon Peserta Lelang

Walaupun Objek Lelang ditujukan untuk calon peserta lelang seluruh Indonesia, namun untuk objek lelang tanah dan bangunan UUHT yang berlokasi di Priangan Timur tentu akan lebih menarik untuk masyarakat berdomisili di Priangan Timur, Sayangnya masyarakat Priangan Timur cenderung memilih membeli properti secara clean and clear atau tidak ada risiko sanggahan/gugatan untuk jenis lelang eksekusi akibat penjualan secara lelang.

- Lelang eksekusi UUHT dengan nilai milyaran dirasa kurang terjangkau oleh masyarakat priangan timur apalagi dengan adanya risiko sanggahan/gugatan kedepannya.

• Rendahnya pengetahuan masyarakat terkait lelang khususnya lelang online

Terkait penggalan potensi lelang lainnya di luar Hak Tanggungan seperti lelang sukarela, terkendala dengan kurangnya pengetahuan masyarakat dalam tata cara pengajuan permohonan lelang online.

Untuk menghindari terjadinya kegagalan atau penurunan kinerja di bidang Lelang, KPKNL Tasikmalaya telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya, yaitu :

- Optimalisasi pelaksanaan Lelang Terjadwal
- Selalu menggalakan pelaksanaan lelang UMKM
- Intimasi dan pelaksanaan rapat koordinasi bulanan dengan stakeholder tidak kendor

A.4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencapai target dan mewujudkan visi dan misi, KPKNL Tasikmalaya dalam hal ini pimpinan organisasi tidak henti-hentinya selalu memberikan pengarahan dan pembinaan kepada para pegawai untuk melakukan efisiensi baik efisiensi di bidang sarana dan prasarana maupun efisiensi di bidang anggaran. Meskipun ada efisiensi dan penghematan, namun hal ini tidak mempengaruhi kinerja, terbukti dengan adanya penghematan namun target tetap tercapai.

Di sisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki, sampai dengan 31 Desember 2022 KPKNL Tasikmalaya mempunyai pegawai sebanyak 32 pegawai dengan berbagai tingkat pendidikan dan golongan. KPKNL Tasikmalaya memiliki Pejabat Fungsional Pelelang sebanyak 3 (tiga) orang, Juru Sita sebanyak 2 (dua) Orang, dan Pejabat Fungsional Penilai sebanyak 2 (dua) orang sedangkan 1 (satu) pegawai sedang Tugas Belajar.

A.5 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Sebagai langkah antisipatif untuk menjaga agar tujuan dan target organisasi bisa tercapai dengan baik, KPKNL Tasikmalaya telah mengambil beberapa langkah atau kebijakan yang dapat mendukung tercapainya target kinerja Tahun 2022, yaitu melakukan sosialisasi tentang tugas dan fungsi serta peranan KPKNL Tasikmalaya, antara lain :

- Melakukan FGD dan sosialisasi, baik secara langsung maupun secara online (webinar) dengan stakeholder Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah di seluruh wilayah kerja KPKNL Tasikmalaya.
- Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat luas di antaranya melalui Public Campaign, media sosial, Press Release serta bekerjasama dengan media eksternal antara lain Radar TV melalui TalkShow, Radio FM Belasalam dan Koran Media Cetak Radar Tasik terkait pemberitaan kegiatan KPKNL Tasikmalaya yang melayani stakeholder (masyarakat) Tahun 2022.
- Program sosialisasi tersebut berdampak sangat baik, yaitu pada akhir Tahun 2022 dan pada awal Tahun 2022 KPKNL Tasikmalaya mendapat penyerahan BKPn baru dari Pemerintah Daerah yaitu dari RSUD Kab. Ciamis dan Kota Tasikmalaya, dan permohonan lelang yang cukup banyak.

penyerah piutang. Hal ini guna meminta pertanggung jawaban Penyerah Piutang atas upaya mereka dalam melaksanakan penyelesaian BKPN yang diserahkan kepada PUPN dalam hal ini guna menghindari PUPN dijadikan sebagai tempat sampah oleh Penyerah Piutang.

Seksi PN berkeyakinan Penyerah Piutang pun memiliki target terkait penyelesaian piutang yang ada pada mereka.

- Mencari sumber sumber penerimaan lain guna membantu penerimaan BKPN masuk Kategori I.
- Diperlukan garis waktu (time line) yang jelas dalam pelaksanaan strategi di atas di antaranya:
- Mulai periode Q1 hingga Q4 tahun 2023 dilaksanakan peningkatan atas setiap tahapan pada pengurusan piutang negara.
- Diprioritaskan pada kuartal pertama akan dilakukan upaya pemanggilan baik kepada debitur, penjamin hutang maupun Penyerah Piutang dalam rangka memperoleh gambaran jelas atas penyelesaian BKPN;
- Pelaksanaan koordinasi dengan Penyerah Piutang akan dilaksanakan di kuartal pertama baik secara langsung dengan melakukan kegiatan rapat maupun melalui tata persuratan.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2022 :

Jenis Pendapatan	Besaran
PNBP Aset	Rp2.764.984.547,00
Biad PPN	Rp10.179.456,00
PNBP berupa bea lelang	Rp2.646.298.671,00
Total Pendapatan Negara Bukan Pajak	Rp. 5.421.462.674,00

Realisasi penyerapan anggaran pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 1,729,025,938,00 atau mencapai 91,17% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 1,896,586,000,00.

Daftar Penghargaan KPKNL Tasikmalaya Tahun 2022

1. Unit Kerja Berpredikat Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
2. Penghargaan Menteri Keuangan Nagara Dana Satria Tim Kompetisi Kedai Lelang UMKM 2022
3. Peringkat III terbaik kinerja pelaksanaan Anggaran Sems II 2022 dari KPPN Tasikmalaya
4. Dukungan Pengamanan dan Pengisian SPT Pajak tahun 2022 dari KPP Pratama Tasikmalaya
5. Penghargaan atas Kontribusi kepada PAD Kota Tasikmalaya dan Kab Garut 2022
6. Penghargaan Peringkat II Pengelolaan DIPA TA 2022 dari KPPN Tasikmalaya

A.6 Analisis atas pelaksanaan rencana aksi (mitigasi risiko) yang telah disusun dalam pencapaian target

Tercapainya IKU pada tahun 2022 antara lain atas risiko sebagai berikut:

- Satuan kerja tidak menindaklanjuti persetujuan pengelolaan BMN telah ditangani secara parsial sebab risiko ini hanya ditindaklanjuti dengan hanya memberikan surat himbauan;
- Rendahnya kualitas Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) yang diterima dari K/L ditangani optimal baik melalui penyampaian Nota Dinas rencana penugasan, penyampaian surat tugas pelaksanaan penanganan risiko maupun penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas;
- Objek lelang tidak dapat dikuasai oleh pembeli lelang telah ditangani optimal dengan penyampaian Surat Tugas dan Laporan Pelaksanaan Tugas kepada Seksi KI;
- Adanya pembatalan lelang telah ditindaklanjuti dengan penyampaian surat himbauan kepada Satuan Kerja perihal perlunya ketelitian saat melaksanakan pengajuan permohonan pelaksanaan lelang;
- Adanya aset yang berpotensi idle pada satker Kementerian atau Lembaga tidak ditangani optimal sebab hingga hari ini Seksi KI hanya peroleh data adanya penyampaian surat himbauan tanpa disertai dengan penyampaian data penugasan maupun laporan terkait kegiatan penugasan dimaksud;
- Banyaknya piutang negara yang tidak dapat ditagih telah ditangani optimal dengan melaksanakan penugasan terkait koordinasi dan upaya penagihan kepada debitur disertai penyampaian laporan penugasan kepada Seksi KI

A.7 Rencana Aksi

Rencana aksi dan atau strategi yang akan dilaksanakan pada periode selanjutnya sebagai berikut:

1. Terkait penyelesaian BKPN di antaranya sebagai berikut:

Terhadap seluruh BKPN yang saat ini berjumlah 1.729 (seritu tujuh ratus dua puluh sembilan) berkas kasus piutang negara aktif (sumber focus PN), Seksi PN akan berupaya melakukan pemaanggilan kembali atas debitur dan atau penjamin hutang perolehan BKPN perolehan s.d. tahun 2022 terkait jumlah utang piutang yang masih tercatat dan seyogyanya telah diselesaikan.

Atas BKPN yang masuk ke dalam kategori I tersebut, akan kembali dilakukan kegiatan konfirmasi atas jumlah jaminan harta bergerak, sebab nyatanya jaminan tersebut hampir seluruhnya telah berpindahtangan. Atas keadaan tersebut Seksi PN akan mencoba melaksanakan koordinasi dengan baik dengan pihak samsat maupun kepolisian guna mengidentifikasi kemungkinan adanya cacat hukum.

Atas BKPN yang tidak didukung oleh barang jaminan yang masuk ke dalam penyelesaian kategori II yakni atas seluruh BKPN perolehan 1 Januari 2011 s.d. 31 Desember 2019, dan atau ada jaminan namun hanya berupa letter C, Seksi PN akan kembali melaksanakan koordinasi dengan

BAB IV PENUTUP

Dari beberapa hal yang sudah diuraikan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa capaian kinerja organisasi KPKNL Tasikmalaya pada Tahun Anggaran 2022 adalah memuaskan. Seluruh IKU yang telah ditetapkan termasuk WBBM berhasil diraih melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja KPKNL Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022 memuaskan, tercermin dari Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang dicapai sebesar 111,77%. Namun demikian seluruh Jajaran KPKNL Tasikmalaya bertekad untuk terus meningkatkan kinerjanya untuk lebih baik lagi di masa yang akan datang.

KPKNL Tasikmalaya akan menerapkan beberapa langkah yang sekiranya akan dapat meningkatkan kinerjanya, antara lain :

- Membahas dan menyusun rencana kerja yang terukur, dan segera mewujudkannya dalam tindakan yang nyata.
- Melakukan sosialisasi dalam hal Pengelolaan Kekayaan Negara, Pengurusan Piutang Negara, dan Lelang kepada seluruh satker/pengguna jasa secara terjadwal dan berkesinambungan.
- Berusaha menyelesaikan progres sertifikasi.
- Melakukan penggalian potensi piutang daerah (Pemda) agar diserahkan ke KPKNL, dan penggalian potensi ini akan dilakukan secara konsisten.
- Selalu berusaha menciptakan suasana kantor yang kondusif, suasana yang saling menghormati dan menghargai, komunikasi yang baik dan efektif di antara para pegawai, sehingga akan tercipta suasana yang nyaman, aman dan menyenangkan dalam bekerja.
- Dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
- Selalu berusaha mengembangkan kualitas dan kapasitas SDM, dengan mengikutkan pegawai dalam kegiatan diklat dan workshop.
- Selalu memberikan pengarahan dan pembinaan kepada seluruh pegawai agar dalam bekerja selalu mematuhi SOP yang telah ditetapkan.
- Selalu menekankan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dalam setiap aspek pekerjaan, sehingga akan muncul niat baik, rasa ikhlas dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada para pengguna jasa yang nantinya akan mendukung terciptanya pelayan prima.
- Selalu mengadakan knowledge sharing atau transfer ilmu pengetahuan di antara sesama pegawai.
- Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara terjadwal dan berkesinambungan.
- Selalu bersama-sama dalam mencari solusi dan pemecahan terbaik terhadap masalah yang timbul.
- Selalu memberikan pembinaan dan pengarahan serta dukungan dan penghargaan kepada para pegawai sehingga semangat dan motivasi untuk berkinerja baik selalu terjaga.

- Mengoptimalkan tugas dan fungsi seksi Kepatuhan Internal agar semua proses bisnis bisa terjaga dan sesuai koridor peraturan dan SOP.
- Dan terakhir selalu menekankan prinsip bahwa kita bekerja melayani orang lain adalah ibadah.

LAMPIRAN



9. Penghargaan Menteri Keuangan Negara Dana Satria Tim Kompetisi Kedai Lelang UMKM 2022



3. Peringkat III terbaik kinerja pelaksanaan Anggaran semester II 2022 dari KPPN Tasikmalaya



5. Dukungan Pengamanan dan Pengisian SPT pajak tahun 2022 dari KPP Pratama Tasikmalaya



6. Penghargaan atas kontribusi kepada PAD Kota Tasikmalaya 2022



7. Penghargaan atas kontribusi kepada PAD Kab. Garut 2022

